

PEREMPUAN KEPALA KELUARGA MISKIN DAN OTORITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN MASA PANDEMI COVID-19

Indra Kertati¹

¹Dosen Magister Administrasi Publik FISIP UNTAG Semarang Jl. Pawiyatan luhur Bendan Duwur Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
email:indra-kertati@untagsmg.ac.id

Abstrak

Perempuan Kepala Keluarga Miskin jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan Laki-laki Kepala Keluarga Miskin. Jumlah yang kecil tidak menandakan persoalan yang dihadapi lebih sederhana. Perempuan kepala keluarga miskin menghadapi persoalan yang rumit terlebih pada masa pandemic covid-19. Kerebatan Pendidikan, upah yang rendah serta kemampuan menyangga kehidupan keluarga dengan beban yang berat dan aksesibilitas yang terbatas, menjadikan mereka berada pada aras marginal. Tantangan yang dihadapi adalah melakukan lompatan ditengah keterbatasan yaitu menjaga agar tidak tertular covid-19 dan sekaligus menyeimbangkan kondisi rumah tangga yang dipimpinnya. Otoritas pengambilan keputusan yang memusat perempuan menjadikan mereka mampu meskipun harus berjuang tanpa batas. Kepala Keluarga menjadi pertaruhan untuk membuat mereka bertahan pada situasi pandemic. Perempuan yang memiliki identitas hukum berupa surat cerai masih mampu untuk mengakses bantuan, namun pada perempuan tanpa identitas hukum, akses tertutup dan harus berjuang sendiri. Temuan penelitian ini menunjukkan otoritas pengambilan keputusan dalam rumah tangga menghadapi pandemic covid-19 sebanyak 98 persen dimiliki sendiri dan 2 persen adalah dukungan anak-anak. Mereka yang berada pada sector informal mengalami kesulitan yang lebih besar dibandingkan yang menggeluti pertanian. Upah yang rendah, waktu yang panjang dan beban yang berat menjadi tantangan yang didapi sehari-hari. Peran pentaholik belum dapat dirasakan untuk meringankan beban mereka. Mereka menghadapi kesulitan dalam keterbatasan dan dalam ujian-ujian yang mempengaruhi pertahanan untuk keberlanjutan hidup.

Katakunci : perempuan, kepala keluarga, miskin, otoritas, covid-19, sector informal, buruh tani.

Abstract

There are fewer female heads of poor families compared to male heads of poor families. The small number does not indicate the problem faced is simpler. Women heads of poor families face complicated problems, especially during the COVID-19 pandemic. Limitations of education, low wages and the ability to support family life with heavy burdens and limited accessibility, make them at the marginal level. The challenge he faces is making a leap amid limitations, namely keeping from contracting COVID-19 and at the same time balancing the conditions

of the household he leads. The decision-making authority that focuses on women makes them capable even though they have to struggle without limits. The Head of the Family is at stake to make them survive the pandemic situation. Women who have legal identities in the form of divorce papers are still able to access assistance, but women without legal identities have closed access and have to fend for themselves. The findings of this study show that 98 percent of the decision-making authority in households facing the COVID-19 pandemic is owned by themselves and 2 percent is supported by children. Those in the informal sector experience greater difficulties than those in agriculture. Low wages, long hours and heavy burdens are daily challenges. The role of pentaholics cannot be felt to lighten their burden. They face difficulties in limitations and in trials that affect the defense for survival.

Keywords : *women, heads of families, poor, authorities, covid-19, informal sector, farm workers.*

1. PENDAHULUAN

Covid-19 menjadi pandemic sekaligus penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga Kesehatan dan kebersihan, walaupun oleh karenanya telah memporakporandakan tatanan kehidupan masyarakat bahkan tata Kelola pemerintahan. Covid-19 menjadi pandemic terbesar yang datang di era good governance, yang menantang untuk penyelesaian cepat, tepat dan bertanggungjawab.

Seperti diketahui covid yang menyerang dunia dengan jumlah kasus sebanyak 501 juta dengan korban jiwa 6,19 juta dan di Indonesia jumlah kasus mencapai 6,04 juta dengan korban meninggal dunia 156 ribu jiwa (data dari <https://covid19.go.id/>). Korban jiwa telah berdampak secara social pada kehidupan keluarga yang tidak utuh akibat ditinggal mati oleh orang tua, suami, isteri atau anak.

Satgas Penanganan Covid-19 per 20 Juli 2021 mengklaim terdapat 11.045 anak menjadi yatim piatu, yatim atau piatu, jumlah anak yang terpapar Covid-19 sebanyak 350.000 anak dan 777 anak meninggal dunia. Data per

tanggal 6 Januari 2022 tercatat 144.116 orang meninggal dunia akibat COVID-19. Sedangkan merujuk data dari Kemensos RI di akhir bulan September 2021 terdapat sebanyak 30.766 anak menjadi yatim, piatu dan yatim piatu akibat COVID-19.

Keadaan yang sama terjadi pada perempuan yang harus menjadi kepala keluarga baik akibat pandemic mkaupun akibat perceraian. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik pada 2020, secara keseluruhan terdapat 11,44 juta keluarga dikepalai oleh perempuan. Itu berarti 15,7% dari total rumah tangga di Indonesia. Angka nya naik ibandingkan tahun 2016, yaitu sebesar 31%.

Data dari PEKKA 95% perempuan kepala keluarga ini bekerja pada sektor informal seperti pedagang, buruh, petani, atau buruh tani. Hampir separuh dari mereka tingkat pendapatannya kurang dari Rp500 ribu tiap bulannya. Sedangkan 32,6% pendapatannya hanya sampai Rp1 juta per bulan. Hanya 18,3% yang pendapatannya

lebih dari Rp1 juta (Pekka et al., 2014).

BPS mengungkapkan perempuan kepala keluarga miskin selain dalam keterbatasan juga berlatar Pendidikan yang kurang memadai. Rata-rata lama sekolah hanya 5,86 tahun 2020 meningkat sedikit tahun 2021 menjadi 6,14 tahun. Selain Pendidikan yang rendah, mereka masuk dalam pekerja sector pertanian yaitu tahun 2020 sebanyak 46,30% dan meningkat pada sector yang sama tahun 2021 sebesar 51,33%. Pada sector pertanian bukan sebagai petani namun buruh tani (BPS, 2022).

Keadaan perempuan kepala keluarga miskin makin sulit selama masa pandemic covid-19. Jumlah tanggungan keluarga yang besar diluar keluarga ini juta dalam satu rumah tangga bisa terdapat anggota keluarga lainnya seperti orang tua, keponakan, atau bahkan saudara jauh. Rata-rata jumlah keluarga pada perempuan kepala keluarga miskin mencapai 4-5 orang.

Beban berat yang dilalui ini sebagai akibat ketidakseimbangan antara beban yang harus ditanggung dan perubahan situasi pandemic yang harus dihadapi dalam keterbatasan. Selain sebagai besar perempuan kepala keluarga miskin bergerak sebagai buruh tani mereka juga berada pada sector informal.

Berdasarkan proksi pekerja formal dan informal di atas didapatkan hasil seperti gambar 2 di bawah ini di mana dari tahun 2017-2019 sebagian besar KRTL dan KRTP di Indonesia bekerja di sector informal. Jika dilihat persentase KRTL dan KRTP maka persentase pekerja informal di Indonesia dari tahun 2017- 2019 lebih tinggi pada

KRTP yaitu masing- masing sebesar 71,05 persen, 71,69 persen, dan 72,18 persen, sedangkan pada KRTL masing- masing sebesar 60,11 persen, 60,92 persen, dan 61,35 persen. Dari kedua kondisi tersebut dapat dilihat bahwa setiap tahun terdapat peningkatan persentase pekerja yang bekerja dalam sector informal (Satriawan, 2021).

Berada pada sector informal, berarti berada pada ketidakpastian akan kondisi ekonomi yang digeluti. Masa pandemic covid-19 dengan berbagai kebijakan yang ada telah menempatkan perempuan kepala keluarga miskin dalam keterpurukan. Mereka yang bekerja di sector informal mengalami kondisi yang berat terlebih dengan kebijakan pembatasan social yaitu PPKM.

Antara ketakutan menghadapi pandemic dan keharusan untuk bertahan membuat para perempuan kepala keluarga miskin harus menguatkan kapasitas diri, membongkar kekakuan dalam mencari nafkah dan mendorong anggota keluarga untuk bersama menghadapi kerentanan.

Pada perempuan yang bergelut dalam bidang pertanian, meskipun mereka berada pada aras marginal yaitu sebagai buruh tani, namun keadaan lebih baik, karena penularan covid-19 di desa lebih terkendali. Mereka memerankan peran-peran sederhana seperti menebarkan benih, memelihara, memanen, dan peran yang dianggap tidak memerlukan tenaga besar (Basavaraj Patil and V Suresh Babus, 2018).

Perempuan kepala keluarga miskin bergelut sendiri mengambil peran besar dalam keluarga dan mengambil keputusan penting untuk

menyelamatkan keluarga dari sulitnya hidup dan pertahanan Kesehatan selama pandemic covid-19 menyerang.

Otoritas pengambilan keputusan tunggal yang dilakukan ternyata mempengaruhi kehidupan keluarga. Ketergantungan pada kepala keluarga adalah mutlak karena tidak ada satupun tempat bergantung. Bagi kepala keluarga miskin yang tercatat sebagai sasaran masyarakat miskin dapat mengandalkan bantuan pemerintah, namun bagi mereka yang identitas hukum masih menggantung pada mantan suami, aksesibilitas pada bantuan pemerintah semakin sulit untuk ditembus.

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kemampuan perempuan kepala keluarga miskin mengambil keputusan dalam situasi pandemic covid-19 ini untuk bertahan menghadapi kehidupan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menggambarkan situasi yang dihadapi perempuan kepala keluarga miskin dalam mengambil keputusan untuk mempertahankan kehidupan bagi keluarganya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif kualitatif. Penelitian ditempatkan pada kontinum yang menunjukkan derajat transformasi data selama proses analisis data dari deskripsi ke interpretasi. Penggunaan pendekatan fenomenologi deskriptif, memiliki tingkat yang relatif rendah berbeda dengan grounded theory atau hermeneutik fenomenologi, di mana tingkat interpretasi yang lebih tinggi dan kompleksitas diperlukan. Penelitian deskriptif kualitatif,

memerlukan interpretasi, tidak hanya terletak pada pengetahuan yang dapat berasal fenomena yang dideskripsikan, namun metode penelitian sebagai entitas hidup yang menolak klasifikasi sederhana, dan dapat menghasilkan penetapan makna dan temuan yang solid (Vaismoradi et al., 2013).

Selain menggambarkan fenomena yang terjadi pada subyek penelitian, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang relevan untuk menguatkan temuan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi pada daerah terpilih yaitu Kota Surakarta dan Kabupaten Grobogan. Informan adalah perempuan kepala keluarga miskin, perangkat desa dan kelurahan dan Dinas yang terkait yaitu Dinas pengampu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas pengampu urusan UMKM dan pengampu pertanian.

Pengolahan data digunakan triangulasi. Triangulasi ini menggunakan triangulasi metode, temuan, dan cross section diantara data sekunder dan primer (David Chitate, 2020). Analisis data menggunakan analisis kualitatif yang dimulai dari reduksi data hingga interpretasi atas data yang ditemukan (Matthew B. Miles, 1994).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PEREMPUAN DAN KEMISKINAN

Kemiskinan menjadi akar melemahkan kapasitas dalam menghadapi kehidupan yang lebih baik. Teori kemiskinan menegaskan bahwa individu bertanggung jawab atas situasi kemiskinan mereka sendiri. Faktor individu menyebabkan atau memicu kemiskinan

termasuk adalah sikap, modal manusia, dan partisipasi kesejahteraan. Kemiskinan disebabkan oleh kurangnya kualitas genetik seperti kecerdasan yang tidak begitu mudah terbalik. Kerja keras individu, dan tanggung jawab untuk memperoleh kebutuhan dasar termasuk makanan, tempat tinggal dan layanan perawatan Kesehatan mutlak dilakukan. Bakat, kebajikan, dan kerja keras dapat mengantarkan pada kesuksesan (Addae-Korankye, 2019).

Kemiskinan dapat melanda laki-laki maupun perempuan. Teori kemiskinan individu membuktikan bahwa kemiskinan tidak memandang umur, gender dan jenis kelamin.

Pada 1980-an, sekelompok feminis dunia ketiga mulai menganalisis fenomena kemiskinan dari perspektif gender. Mereka mengidentifikasi serangkaian fenomena dalam kemiskinan yang secara khusus mempengaruhi perempuan dan menunjukkan bahwa perempuan miskin melebihi jumlah laki-laki miskin, bahwa perempuan lebih menderitakemiskinan yang parah daripada laki-laki dan bahwa kemiskinan perempuan menunjukkan kecenderungan yang lebih nyata untuk meningkat, terutama karena meningkatnya jumlah rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan. Kumpulan fenomena ini kemudian disebut "feminisasi kemiskinan" (Sonia Montaña, 2003).

Meskipun gagasan feminisasi kemiskinan telah dipertanyakan, ia telah

menunjukkan perlu mengakui bahwa kemiskinan mempengaruhi laki-laki dan perempuan dengan cara yang berbeda, dan bahwa gender adalah faktor —seperti usia, faktor etnis dan lokasi geografis, antara lain—yang mempengaruhi kemiskinan dan meningkatkan kerentanan perempuan terhadapnya.

Data BPS juga menunjukkan meskipun jumlah perempuan miskin yang menjadi kepala rumah tangga miskin lebih kecil namun, latar belakang individu perempuan miskin lebih buruk dibandingkan laki-laki kepala keluarga miskin sebagaimana tertuang dalam table berikut :

Tabel 1 : Karakteristik RTM

Karakteristik Rumah Tangga Miskin	2020		2021
	Sem 1 (Mar)	Sem 2 (Sep)	Sem 1 (Mar)
Rata-rata jumlah anggota rumah tangga (orang)	4.66	4.83	4.49
Persentase kepala rumah tangga wanita	15.88	13.37	13.19
Rata-rata usia kepala rumah tangga (tahun)	50.75	50.91	50.18
Rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga (tahun)	5.86	-	6.14
Tingkat pendidikan kepala rumah tangga (%)	-	-	-
a. Tidak tamat SD	33.27	29.68	29.86
b. SD	37.16	37.03	37.74

c. SMP	13.82	14.99	15.05
d. SMA	14.31	16.61	15.54
e. PT	1.44	1.70	1.81
Sumber penghasilan utama rumah tangga (%)	-	-	-
a. Tidak Bekerja	15.02	14.76	12.90
b. Pertanian	46.30	45.78	51.33
c. Industri	6.58	6.55	6.08
d. Lainnya	32.10	32.91	29.69

Sumber : Diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), BPS, 2022

Kondisi sebagaimana digambarkan dalam table diatas menunjukkan bahwa perempuan kepala keluarga miskin memiliki kelemahan dalam hal beban keluarga yaitu 4-5 orang, usia produktif rata-rata 50 tahun, rata-rata lama sekolah tak lebih dari 6,11 tahun (lulus Sekolah Dasar), beberapa bahkan tidak tamat SD. Jika dijumlahkan yang tidak tamat Sd dan Tamat SD sudah mencapai 66,71 persen tahun 2020 dan tahun 2021 mencapai 67,60 persen. Ditilik dari sumber penghasilan terdapat data perempuan KK yang tidak bekerja sebanyak 12,90 persen tahun 2021. Bergerak di sector pertanian dari tahun 2020 sebesar 45,78 persen menjadi 51,33 persen tahun 2021(BPS, 2022).

Kondisi sebagaimana tersebut diatas adalah bagian dari fakta yang mengejutkan karena kemiskinan yang melanda perempuan dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan dalam

menjangkau akses pendidikan, ekonomi dan sumberdaya.

Kondisi yang sama terjadi di Kabupaten Grobogan dan Kota Surakarta. Perempuan KK miskin di Kabupaten Grobogan cenderung berada di desa yang bergantung hidup pada pertanian, sebagai buruh tani. Sedangkan di Kota Surakarta lebih banyak berputar di sector informal. Keadaan perempuan KK miskin yang ada di desa jauh lebih baik dibandingkan yang di kota. Meskipun buruh tani, kondisi desa lebih ramah dalam hal mendapatkan pendapatan. Sedangkan di kota usaha harus dilakukan lebih keras, terlebih saat PPKM, yang menup hampir semua sector usaha, sehingga upaya untuk mensiasati hidup jauh lebih keras dibandingkan di sector pertanian.

B. MEMPERTAHANKAN KELUARGA

Keluarga merupakan tempat bersemayam Bersama akan-anak dan keluarga besar lainnya. Bagi perempuan keluarga menjadi idaman dalam berinteraksi yang efektif. Dalam banyak penelitian dikemukakan bahwa keluarga memiliki kekuatan yang kuat untuk mengikat satu dengan yang lain.

Perempuan Kepala Keluarga miskin bertanggungjawab penuh terhadap keluarga baik keluarga inti maupun keluarga besar. Hasil penelitian menunjukkan Kepala Keluarga miskin yang bekerja di sector pertanian jauh lebih intens dan intim Bersama keluarganya. Jaraka rumah dengan tempat bekerja memungkinkan hal itu terjadi. Selain itu pekerjaan

sebagai buruh tani tidak membuat mereka harus bekerja setiap hari. Tetangga upah non uang menjadi tali bagi mereka untuk bertahan hidup.

Pada perempuan yang bekerja serabutan, buruh pabrik, atau mengelola usaha kecil-kecilan, intensitas dengan keluarga lebih renggang. Hal ini karena kondisi keluarga yang jauh dari jangkauan tempat mereka bekerja, juga disebabkan oleh kesempatan bekerja yang membuat jarak antar mereka jauh.

Makna keluarga mengalami transformasi besar-besaran. Ada yang dramatis perubahan sikap terhadap kasih sayang, privasi, dan hak-hak individu (terutama dari kerabat), campur tangan kelompok dan komunitas)). Gagasan "keluarga" hanya merujuk untuk pasangan suami-istri dan anak-anak mereka menjadi umum hanya di akhir 18 dan awal abad ke-19. Orang tua dan kerabat dapat memberikan tekanan besar pada pasangan, terutama di lingkungan tertinggi masyarakat di mana tekanan keuangan dapat dibawa untuk menanggung (Bryant & Claridge, 2004).

Dinamika keluarga menjadi hal penting untuk saling memahami dan menguatkan. Pada perempuan kepala keluarga miskin hal ini terjadi sangat cepat, khususnya pengaruh lingkungan. Campur tangan social dalam arti menjadikan keluarga miskin semakin tersisih adalah awal nestap bagi keluarga tersebut.

C. PERAN MULTI PIHAK

Dalam rangka membangun kekuatan keluarga yang dipimpin oleh perempuan, peran para pihak menjadi penting. Konsep penta-helix atau multipihak dimana unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media bersatu padu berkoordinasi serta berkomitmen untuk mengembangkan inovasi pengetahuan yang memiliki potensi untuk dikapitalisasi atau ditransformasi menjadi produk maupun jasa yang memiliki nilai ekonomis. Salah satu tujuan pendekatan ini adalah dalam rangka upaya penguatan ketahanan ekonomi masyarakat untuk menemukan pola kemitraan dalam pengembangan potensi suatu kawasan yaitu dengan melibatkan multipihak yang saling bersinergi.

Peran serta multi pihak selama ini belum optimal, meskipun sudah cukup banyak kegiatan yang dilakukan. Koordinasi anatar pihak di tingkat Desa dan Kelurahan berjalan baik, namun sasaran sebara khusus pada perempuan kepala keluarga miskin belum sepenuhnya tercapai. Beberapa Langkah yang biasa ditempuh dalam menggerakkan Multi Pihak adalah membangun jaringan dan kelembagaan.

Menurut Howlett dan M. Ramesh {Howlett dan Rames (1995), dalam Suwitri (2011)} mengemukakan bahwa aktor kebijakan (policy aktor) merupakan policy subsystem yang berada dalam jejaring kebijakan antara *organization of*

the international system, organization of the society dan organization of the state. Aktor kebijakan terdiri atas : 1) *elected officials* yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, 2) *appointed officials* atau pejabat politik yang ditunjuk oleh pejabat politik terpilih untuk duduk dalam birokrasi, 3) *interest group*, 4) *research organization*, 5) media massa. Aktor-aktor tersebut saling berinteraksi untuk memberikan persetujuan (pro) maupun ketidaksetujuan (kontra) terhadap suatu kebijakan (Yuniningsih et al., 2019).

D. OTORITAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Perempuan memiliki otoritas menjaga dan mengamankan keluarga. Mereka rata-rata mengambil keputusan tunggal atas hidup keluarga. Beberapa menyatakan keputusan diambil sendiri tanpa pertimbangan orang lain (76%), sebanyak 24% mendapatkan pertimbangan dari keluarga, anak dan orang tua. Hasil wawancara menunjukkan, perempuan yang hidup di Desa jauh lebih terbuka menerima masukan dalam pengambilan keputusan, namun perempuan miskin kota lebih mampu mengambil keputusan. Otoritas digunakan untuk mengatur keluarga termasuk diri sendiri.

keluarga miskin cenderung mengambil keputusan dengan pendekatan rasional yaitu

keputusan yang rasional dan memiliki informasi yang lengkap.

Proses pengambilan keputusan yang rasional terdiri dari sejumlah: langkah-langkah, seperti yang diberikan oleh Simon (1977) yaitu :

1. Intelijen: menemukan kesempatan untuk membuat keputusan;
2. Desain: menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan tindakan;
3. Pilihan: memilih tindakan tertentu dari yang tersedia; dan
4. Review: menilai pilihan masa lalu. Dalam rasionalitas klasik atau sempurna, metode analisis keputusan digunakan untuk melampirkan numerik
5. Nilai atau utilitas untuk masing-masing alternatif selama fase "pilihan". Alternatifnya dengan utilitas tertinggi (atau utilitas yang diharapkan subjektif maksimum) dipilih.

4. KESIMPULAN

- a. Perempuan Kepala Keluarga miskin memiliki kapasitas untuk dikembangkan terutama buat nabung besar dalam merespon saha-usaha.
- b. Kemampuan memimpin, menggerakkan masyarakat untuk percaya bahwa roda ekonomi terus berputar.

5. DAFTAR PUSTAKA

Addae-Korankye, A. (2019). Theories of Poverty: A Critical Review. *An International Peer-Reviewed Journal*, 48. <https://doi.org/10.7176/JPID>

(2018). Role of women in agriculture. *International Journal of Applied Research*, 4(12), 109–114. www.allresearchjournal.com

Menurut Status Kemiskinan. <https://www.bps.go.id/indicator/23/207>

- /1/karakteristik-rumah-tangga-menurut-status-kemisikinan.html
- Bryant, J., & Claridge, M. (2004). *Theories of the Family and Policy*. <https://www.researchgate.net/publication/5204043>
- David Chitate. (2020). *Introduction Trianggulation* (David Chitate, Ed.; I, Vol. 1). UNAIDS.
- Matthew B. Miles, A. M. H. (1994). *Qualitatif Data Analysis Miles And Huberman* (A. M. H. Matthew B. Miles, Ed.; 2nd ed., Vol. 2). Sage Publication.
- Pekka, P., Tri Wusaningsih, K., Rianingsih, M., Nugroho, A., Villa Sahara, F., Indah Wilujeng, D., Faezathi, O., Sriharini, N., Prabandini, N., Indah Tri Kusumawati, R., Purnama, A., Hanim, O., Nurnaningrum, N., Rukamah, M., Indra, N., Urianti, S., Vienayanti, D., Karina, Y., Wardiyah, R., ... Hadiwidjaja, G. (2014). *LAPORAN HASIL SISTEM PEMANTAUAN KESEJAHTERAAN BERBASIS KOMUNITAS (SPKBK-PEKKA) Lembaga Penelitian SMERU Bekerja sama dengan Sekretariat Nasional PEKKA*. www.smeru.or.id
- Satriawan, D. (2021). KARAKTERISTIK KEPALA RUMAH TANGGA PEREMPUAN DALAM PEKERJAAN SEKTOR INFORMAL. *Sosio Informa*, 7(01).
- Sonia Montaño. (2003). Understanding poverty from a gender perspective. *Women and Development Unit*.
- Vaismoradi, M., Turunen, H., & Bondas, T. (2013). Content analysis and thematic analysis: Implications for conducting a qualitative descriptive study. In *Nursing and Health Sciences* (Vol. 15, Issue 3, pp. 398–405). <https://doi.org/10.1111/nhs.12048>
- Yuniningsih, T., TRI Darmi, & Sulandari, S. (2019). MODEL PENTAHELIK DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA SEMARANG. *Journal of Public Sector Innovation*, 3(2), 84–93.